



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I 2026



☎ 022 - 7336965

🌐 jabar.bp2mi.go.id

📷 @bp2mi_jabar

**MIGRAN AMAN
RAKYAT SEJAHTERA
INDONESIA MAJU**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2026. Penyusunan Laporan Kinerja BP3MI Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pedoman penyusunan Laporan Kinerja yang baru berdasarkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Isi dari laporan ini menguraikan seluruh aktivitas secara rinci dan sistematis dengan menggunakan metode Laporan Kinerja yang menggambarkan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi, Penjelasan yang memadai atas Pencapaian Kinerja dan Pembandingan Capaian Indikator Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan.

Mudah-mudahan Penyajian Laporan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2026 ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama 1 tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, 15 April 2026

Kepala,



Singgih Hermawan, S.I.K., M.A.P.
Kombes Pol. NRP. 80091267



DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis BP3MI Jawa Barat Tahun 2025-2029	1
B. Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Triwulan	4
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	5
C. Realisasi Anggaran	22
BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan	24
B. Saran Tindak Lanjut	26



DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 1.1	Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2026	2
Tabel 1.2	Reviu Target Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2026	3
Tabel 2.1	Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan	4
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Tahun 2026 Berdasarkan Realisasi Triwulanan	5
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama 1	6
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama 2	8
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Utama 3	10
Tabel 2.6	Rekap Jumlah Pengaduan berdasarkan Status Penanganan	11
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Utama 4	12
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Utama 5	15
Tabel 2.9	Predikat Penilaian AKIP	16
Tabel 2.10	Nilai Komponen Manajemen Kinerja	17
Tabel 2.11	Capaian Indikator Kinerja Utama 6	18
Tabel 2.12	Capaian Indikator Kinerja Utama 7	20
Tabel 2.13	Nilai Kinerja Anggaran	21
Tabel 2.14	Capaian Anggaran dan Kinerja Triwulan I Tahun 2026	22

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2026 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2026. BP3MI Jawa Barat pada tahun 2026 memiliki 5 (lima) Sasaran Strategis dengan total 7 (tujuh) Indikator Kinerja, dan 7 (tujuh) Target Kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 7 (tujuh) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 3 target; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tersedianya Data Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	2.100 orang	0	0
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Nonpemerintah	Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan	63%	74,8%	118,73
Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	100%	100
Meningkatnya Fasilitasi Layanan Pemberdayaan oleh BP3MI	Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi oleh BP3MI	64 orang	12 orang	18,75



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan di Lingkungan BP3MI	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	75	78,30	104,4
	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI	65	66	101,54
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI	80	47,53	59,41

Kinerja keuangan BP3MI Jawa Barat tahun 2026 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 1.418.515.754,- atau 28,05% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 5.057.485.000,-.

Capaian kinerja BP3MI Jawa Barat diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



BAB I – PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BP3MI JAWA BARAT

Rencana Strategis (Renstra) BP3MI Jawa Barat 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh BP3MI Jawa Barat beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra BP3MI Jawa Barat mengacu pada Renstra KP2MI/BP2MI tahun 2025-2029. Secara ringkas substansi BP3MI dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi BP3MI Jawa Barat selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diharapkan memberi arah ke masa depan yaitu: *“Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045”*, KP2MI/BP2MI menetapkan Visi dalam periode 2025-2029 yang berbunyi:

”KP2MI yang Profesional, Responsif, Obyektif, Terpercaya, Empati, Berkomitmen, Sinergis, Inovatif (PROTEKSI) sebagai Poros Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan dan mendukung Visi tersebut, BP3MI Jawa Barat menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

- a) Meningkatkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- b) Meningkatkan Promosi, Peluang Kerja dan Kompetensi untuk memenuhi Pasar Kerja Luar Negeri;
- c) Meningkatkan Kualitas Layanan Penempatan;
- d) Meningkatkan Layanan Pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
- e) Mewujudkan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.



3. Tujuan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi, BP3MI Jawa Barat merumuskan tujuan yang akan dicapai yaitu:

- a) Terwujudnya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif..

B. PERJANJIAN KINERJA BP3MI JAWA BARAT

Sebagai penjabaran tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2026, BP3MI Jawa Barat telah menetapkan Sasaran Strategis dan IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ditandatangani pada bulan Januari 2026 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Data Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	30 orang
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Nonpemerintah	Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap materi Orientasi Pra Pemberangkatan	63%
Meningkatkan Fasilitas Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Presentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	100%
Meningkatnya Fasilitas Layanan Pemberdayaan oleh BP3MI	Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi oleh BP3MI	44 orang
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan di Lingkungan BP3MI	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	75
	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI	65
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI	80
1. Pelayanan Penempatan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, Anggaran sebesar Rp. 1.927.071.000,-		
2. Dukungan Manajemen, Anggaran sebesar Rp. 3.130.414.000,-		
Jumlah Pagu Anggaran BP3MI Jawa Barat Tahun 2026 sebesar Rp. 5.057.485.000,-		



Sehubungan terdapat perubahan nama kegiatan yang mempengaruhi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, maka terdapat Reviu Target Perjanjian Kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Reviu Target Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
<i>Tersedianya Data Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia</i>	<i>Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI</i>	2.100 orang
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Nonpemerintah	Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan	63%
Meningkatnya Fasilitas Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	100%
<i>Meningkatnya Fasilitas Layanan Pemberdayaan oleh BP3MI</i>	<i>Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi oleh BP3MI</i>	64 orang
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan di Lingkungan BP3MI	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	75
	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI	65
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI	80
1. Pelayanan Penempatan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, Anggaran sebesar Rp. 1.927.071.000,-		
2. Dukungan Manajemen, Anggaran sebesar Rp. 3.130.414.000,-		
Jumlah Pagu Anggaran BP3MI Jawa Barat Tahun 2026 sebesar Rp. 5.057.485.000,-		



BAB II – AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

Pengukuran kinerja dilakukan dengan metode sederhana yang membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan dan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran kinerja dimaksud.

Laporan Kinerja Triwulan I ini menyajikan pengukuran capaian kinerja BP3MI Jawa Barat selama Triwulan I dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja triwulan berikutnya. Secara rinci hasil pengukuran capaian kinerja triwulan tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya Data Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	0 orang	0 orang	800 orang	-	800 orang	-	500 orang	-
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Nonpemerintah	Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap materi Orientasi Pra Pemberangkatan	63%	74,8%	63%	-	63%	-	63%	-
Meningkatkan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Presentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-
Meningkatnya Fasilitasi Layanan Pemberdayaan oleh BP3MI	Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi oleh BP3MI	12 orang	12 orang	24 orang	-	24 orang	-	4 orang	-
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan di	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	75	78,30	75	-	75	-	75	-



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Lingkungan BP3MI	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI	65	66	65	-	65	-	65	-
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI	80	47,53	80	-	80	-	80	-

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2026 diukur dari seluruh pencapaian IKU. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2026 sebesar 63,35% yang dihitung dari rata-rata capaian 7 (tujuh) IKU. Berikut ringkasan capaian kinerja BP3MI Jawa Barat Triwulan I tahun 2026:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Tahun 2026 Berdasarkan Realisasi Triwulanan

Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi				Capaian s.d. TW I (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Tersedianya Data Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	2.100 orang	0	-	-	-	0
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Nonpemerintah	Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap materi Orientasi Pra Pemberangkatan	63%	74,8%	-	-	-	118,73
Meningkatkan Fasilitas Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Presentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	100%	-	-	-	100
Meningkatnya Fasilitas Layanan Pemberdayaan oleh BP3MI	Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi oleh BP3MI	64 orang	12 orang	-	-	-	18,75
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	75	78,30	-	-	-	104,4



Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi				Capaian s.d. TW I (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Transparan di Lingkungan BP3MI	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI	65	66	-	-	-	101,54
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI	80	47,53	-	-	-	59,41

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja BP3MI Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

“TERSEDIANYA DATA PERSEDIAAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA”

IKU 1 – Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	2.100 orang	0 orang	0%

a. Informasi Kinerja

Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI dihasilkan dari kegiatan Edukasi Peluang Kerja dan Migrasi Aman yang berfokus pada edukasi prosedur resmi, peningkatan perlindungan dan pencegahan penempatan ilegal untuk mengurangi kasus Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Kegiatan ini menyasar peningkatan wawasan Calon Pekerja, memaksimalkan remitansi, dan memfasilitasi penempatan secara aman dan bermartabat. Terdapat informasi kinerja pada kegiatan Edukasi, diantaranya:

- Target Utama : Meningkatkan wawasan mengenai mekanisme bekerja ke Luar Negeri secara aman dan legal guna menghindari penipuan atau masalah hukum;
- Capaian Pelindungan : Pada tahun 2024, dilaporkan penurunan signifikan kasus Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;



- Tujuan Edukasi : Memberdayakan Masyarakat melalui informasi lowongan kerja, terutama sektor formal/kelautan, serta memfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan PMI Purna;
- Dampak Ekonomi : Pekerja Migran melalui jalur aman ini berkontribusi signifikan pada ekonomi melalui Remitansi dengan rata-rata gaji antara Rp. 5 juta hingga Rp. 23 juta per bulan (2021-2023);
- Kolaborasi : Kegiatan ini dilaksanakan Bersama KP2MI/BP2MI (BP3MI) dan DPR-RI untuk memberikan pemahaman menyeluruh.

b. Evaluasi Kinerja

Kegiatan Edukasi Peluang Kerja dan Migrasi Aman tahun 2026 menunjukkan fokus kuat pada peningkatan penempatan prosedural melalui penguatan perlindungan. Capaian kinerja menargetkan penurunan PMI nonprosedural dengan realisasi cukup signifikan, namun memerlukan pengawasan berkelanjutan dari pra hingga purna penempatan.

Dalam rangka meningkatkan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional, BP3MI Jawa Barat melakukan upaya penyebaran informasi terkait penempatan prosedural melalui kegiatan Edukasi Peluang Kerja dan Migrasi Aman yang berkolaborasi dengan DPR-RI dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan sosialisasi yang menargetkan peserta sosialisasi dari kalangan masyarakat umum dan para pelajar.

Pada tahun 2026, BP3MI Jawa Barat menargetkan sebanyak 2.100 orang peserta yang terdiri dari 16 Paket kegiatan Edukasi Peluang Kerja dan Migrasi Aman. Pada Triwulan I dan 10 Paket kegiatan Edukasi Penempatan dan Pelindungan CPMI/PMI. Kegiatan Edukasi Peluang Kerja dan Migrasi Aman terdiri dua kegiatan yaitu Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman yang bermitra dengan Komisi IX DPR RI serta Edukasi Penempatan dan Pelindungan CPMI/PMI di tingkat desa. Adapun pada Triwulan I 2026 memiliki target sebesar 0 orang, dan mencapai realisasi sebesar 0 orang.

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

Struktur anggaran tahun 2026 untuk kegiatan Edukasi Peluang Kerja dan Migrasi Aman masih mengalami perubahan dan belum mencapai final,



menjadi faktor penghambat utama mengapa kegiatan belum dapat dilaksanakan pada Triwulan I 2026.

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

Salah satu strategi dalam penyelesaian masalah terkait dari segi waktu yaitu mendorong Tim Tenaga Ahli dari DPR-RI untuk menjadwalkan kegiatan dengan memberikan informasi target akhir dapat dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, serta dengan menyebarkan sumber daya manusia untuk dapat membantu pelaksanaan kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 2

“MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN ORIENTASI PRA PEMBERANGKATAN NONPEMERINTAH”

IKU 2 – Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama 2

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan	63%	74,8%	118,73%

a. Informasi Kinerja

BP3MI Jawa Barat terus mendorong dan mengupayakan peningkatan kualitas penempatan pekerja migran Indonesia yang terampil dan profesional dengan melayani proses penyiapan penempatan pekerja migran Indonesia baik melalui skema G to G, G to P, P to P, maupun perseorangan. Dalam meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia, BP3MI Jawa Barat melaksanakan orientasi pra pemberangkatan dalam upaya meningkatkan pemahaman calon pekerja migran Indonesia terhadap negara penempatan, peraturan ketenagakerjaan di negara penempatan, adat istiadat maupun budaya negara penempatan, serta materi lain yang menunjang pemahaman calon pekerja migran Indonesia dalam mempersiapkan pemberangkatan ke negara penempatan. Selain itu, calon pekerja migran Indonesia juga dibekali pemahaman terkait kesehatan jasmani dan mental dalam mengatasi



permasalahan di negara penempatan melalui kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan.

b. Evaluasi Kinerja

Tahun 2025 terdapat peralihan sistem dari SIAPKerja ke SISKOP2MI. Dalam adaptasi penyesuaian tersebut, masih terdapat kendala terutama untuk skema P to P untuk pengajuan ID sampai pengajuan orientasi pra pemberangkatan. BP3MI Jawa Barat berkoordinasi dengan K/L terkait dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, dalam menunjang pemahaman calon pekerja migran Indonesia dalam materi orientasi pra pemberangkatan, BP3MI Jawa Barat melaksanakan Pre Test dan Post Test terhadap calon pekerja migran Indonesia melalui kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan dengan hasil rata-rata di atas 60%.

Calon pekerja migran Indonesia diberikan pemahaman dalam materi perjanjian kerja, peraturan ketenagakerjaan, adat istiadat atau budaya negara penempatan serta materi penunjang lainnya yang mendorong pemahaman pekerja migran Indonesia dalam bekerja sesuai jabatannya. Materi kesehatan jasmani dan mental serta literasi keuangan yang dapat mendorong pekerja migran Indonesia mengelola keuangan atau pendapatannya selama di negara penempatan. Hal tersebut bertujuan agar pekerja migran Indonesia mandiri secara finansial dan berdaya sesuai minat dan kemampuannya.

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

Dengan adanya perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah serta Peralihan sistem dalam proses penempatan calon pekerja migran Indonesia membuat K/L terkait melakukan penyesuaian sehingga terdapat kendala maupun hambatan yang dihadapi. Untuk mengatasi kendala tersebut, BP3MI Jawa barat terus berusaha meningkatkan pemahaman calon pekerja migran Indonesia dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi peluang kerja ke luar negeri dan migrasi aman di wilayah Jawa Barat serta mendorong kerja sama dalam pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan serta meningkatkan



penempatan PMI terampil dan profesional, BP3MI Jawa Barat terus meningkatkan kualitas instruktur orientasi pra pemberangkatan dengan mengikuti pelatihan dan menyebarkan pre test post test ke calon pekerja migran Indonesia serta menajamkan materi dan pemahaman perjanjian kerja, peraturan ketenagakerjaan serta materi lainnya yang menunjang calon pekerja migran Indonesia dalam persiapan pemberangkatan ke negara penempatan.

SASARAN STRATEGIS 3

“MENINGKATNYA FASILITASI PENANGANAN PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA”

IKU 3 – Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Utama 3

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	100%	100%

a. Informasi Kinerja

Layanan Penanganan Permasalahan disini yang dimaksud adalah layanan pengaduan kasus yang diterima langsung oleh BP3MI Jawa Barat. Menurunnya permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia terjadi dikarenakan BP3MI Jawa Barat selalu berupaya menindaklanjuti permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia dengan memanggil para pihak terkait untuk di mediasi dalam rangka pemenuhan hak PMI. Penanganan permasalahan dilaksanakan dengan cara diantaranya:

- 1) Penerimaan dan pengidentifikasian pengaduan;
- 2) Pencatatan pengaduan dan penganalisisan pengaduan;
- 3) Konsultasi;
- 4) Klarifikasi; dan
- 5) Mediasi (dalam hal tidak dapat selesai di tahap klarifikasi).

**b. Evaluasi Kinerja**

Jumlah pengaduan yang diterima oleh Tim Pelayanan Aduan Mediasi dan Advokasi Pekerja Migran Indonesia pada Pengguna Jasa Perseorangan dan Berbadan Hukum di lingkungan BP3MI Jawa Barat untuk periode Triwulan I tahun 2026 berjumlah 155 kasus. Terdiri dari 113 kasus berupa surat masuk dan 42 kasus berupa pengaduan langsung (tatap muka & Helpdesk). Keseluruhan aduan masuk telah ditindaklanjuti dengan status Dalam Proses (82), Selesai (37), Pelimpahan Internal (1) dan Pelimpahan Eksternal (35). Saat ini BP3MI Jawa Barat telah memiliki layanan aduan online melalui kontak Helpdesk Crisis Center BP3MI Jawa Barat yang dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya. Sebanyak 155 kasus (100%) aduan yang masuk telah ditindaklanjuti melalui proses pendalaman kronologi, klarifikasi, mediasi, persuratan ke direktorat teknis Kementerian P2MI, monitoring tindak lanjut surat dari KP2MI kepada Perwakilan RI di negara penempatan, sampai dengan penutupan kasusnya.

Tabel 2.6
Rekap Jumlah Pengaduan berdasarkan Status Penanganan

No	Status Penanganan Aduan	Triwulan I
1	Dalam Proses	82
2	Pelimpahan Internal	1
3	Pelimpahan Eksternal	35
4	Selesai	37

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah**i. Faktor Pendorong/Penghambat**

Menangani kasus Pekerja Migran Indonesia yang sering ditemukan ialah Pekerja Migran Indonesia yang baru diberangkatan beberapa hari ke negara penempatan secara nonprosedural khususnya di wilayah Timur Tengah, namun baru mengetahui bahwa prosesnya dilakukan secara ilegal, Pekerja Migran Indonesia dan pihak keluarga menyampaikan permohonan bantuan agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Akan menjadi kendala apabila di negara penempatan dirinya telah menandatangani dokumen perjanjian kerja dan terikat hukum yang berlaku di negara penempatan (masuk secara



ilegal, tidak memiliki identitas dan izin kerja, menjadi tanggungjawab kafil/pengguna jasanya). Para Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural, tidak terdaftar di sistem SiskoP2MI, sehingga negara kesulitan melacak keberadaannya dan yang menjadikan proses perlindungan dan pemulangnya memakan waktu lama.

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat kompleks mulai dari jeratan hutang biaya keberangkatan, eksploitasi ditempat kerja, hingga reintegrasi saat kembali ke Indonesia. Secara garis besar strategi penyelesaiannya yaitu penguatan perlindungannya misalnya memberikan pendampingan bagi keluarga untuk melaporkan pihak-pihak yang secara tidak bertanggungjawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia kepada Kepolisian setempat sebagai upaya penegakkan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

SASARAN STRATEGIS 4

“MENINGKATNYA FASILITASI LAYANAN PEMBERDAYAAN OLEH BP3MI”

IKU 4 – Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial, dan Ekonomi oleh BP3MI

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama 4

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial, dan Ekonomi oleh BP3MI	64 Orang	12 orang	18,75%

a. Informasi Kinerja

Dalam hal ini yang dimaksud dengan layanan kepulangan PMI adalah kegiatan fasilitasi pemulangan CPMI/PMI/Keluarganya yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja di luar negeri. Selain itu, Jumlah individu Purna Pekerja Migran



Indonesia (PMI) bermasalah yang menerima layanan rehabilitasi dan reintegrasi setelah mereka kembali dari bekerja di luar negeri. Fasilitas rehabilitasi dalam hal ini antara lain perawatan lanjutan yang dilakukan di dalam negeri bagi PMI yang sakit, baik pemulihan fisik maupun pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam Masyarakat. Fasilitas rehabilitasi dalam hal ini antara lain perawatan lanjutan yang dilakukan di dalam negeri bagi PMI yang sakit, baik pemulihan fisik maupun pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam Masyarakat.

Fasilitas pemberdayaan bagi purna PMI merupakan pemberian pemberdayaan ekonomi dan sosial yang terintegrasi setelah penempatan (edukasi keuangan, kewirausahaan, edukasi akses ke lembaga keuangan, *parenting*).

b. Evaluasi Kinerja

Jumlah target Fasilitas Pelayanan Kepulungan Pekerja Migran Indonesia yang Terkendala, Sakit, dan Meninggal Dunia BP3MI Jawa Barat tahun 2026 adalah sebanyak 14 orang. Pada periode Triwulan I 2026, terdapat fasilitas bantuan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sakit sebanyak 7 PMI, bantuan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) Meninggal Dunia sebanyak 3 Ahli Waris Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan 2 untuk bantuan Calon Pekerja Migran Indonesia Meninggal Dunia.

Jumlah target peserta kegiatan Rehabilitasi, Reintegrasi Sosial Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga BP3MI Jawa Barat pada tahun 2026 adalah 40 orang, 20 orang untuk Pemberdayaan Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga, 20 orang untuk Reintegrasi Sosial Pekerja Migran Indonesia. Pada Triwulan I 2026, belum terlaksananya program Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga dan Reintegrasi Sosial Pekerja Migran Indonesia oleh BP3MI Jawa Barat.



c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

- Faktor pendorong dalam layanan keputungan Pekerja Migran Indonesia yaitu adanya sistem *Crisis Center* melalui SISKOP2MI yang memudahkan pelacakan status PMI secara *Real-time*, kehadiran perwakilan di negara penempatan yang proaktif membantu penyelesaian hak-hak Pekerja Migran Indonesia, adanya layanan *Helpdesk* di Bandara serta adanya Program Pemberdayaan;
- Faktor penghambat atau kendala pada kasus PMI bermasalah yaitu status nonprocedural atau PMI yang berangkat tanpa dokumen resmi dan tidak terdata dalam system sehingga menyulitkan dalam memberikan perlindungan dan menanggung biaya keputungan, namun dengan diberlakukannya Efisiensi Anggaran sebagai imbas Instruksi Presiden melalui Surat Kementerian keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami blokir dan realokasi anggaran, layanan yang dapat difasilitasi ialah pendampingan keputungan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal, sementara bagi yang terkendala akan diupayakan pemulangan secara mandiri, dijemput pihak keluarga, maupun difasilitasi oleh pemerintah daerah;
- Pada pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi bagi PMI dan kegiatan Pemberdayaan PMI Purna terjadi Efisiensi Anggaran sebagai imbas Instruksi Presiden melalui Surat Kementerian keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami blokir dan realokasi anggaran;
- Belum diterbitkannya aturan turunan dari Perubahan Nomenklatur BP2MI menjadi Kementerian P2MI/BP2MI terutama aturan di pada kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi bagi PMI yang mengalami permasalahan dan juga belum tersedianya Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi bagi PMI yang mengalami permasalahan dan kegiatan Pemberdayaan PMI Purna.

i. Strategi Penyelesaian Masalah

- BP3MI Jawa Barat berkoordinasi dengan Kementerian P2MI/BP2MI melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan dan Direktorat Pemulangan

dan Rehabilitasi, serta pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemulangan PMI yang mengalami permasalahan;

- BP3MI Jawa Barat berkoordinasi dengan Kementerian P2MI/BP2MI melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan dan Direktorat Reintegrasi dan penguatan Keluarga petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi bagi PMI yang mengalami permasalahan dan kegiatan Pemberdayaan PMI Purna;
- BP3MI Jawa Barat telah bersurat kepada beberapa daerah dengan permasalahan Pekerja Migran Indonesia terbanyak untuk dapat mengusulkan data calon peserta kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 5

“MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN DI LINGKUNGAN BP3MI”

IKU 5 – Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Utama 5

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	75	78,30	104,4%

a. Informasi Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) internal merupakan komponen krusial dalam SAKIP (sesuai Permenpan RB No 88/2021) untuk mengukur Tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen kinerja. Penilaian berfokus pada kualitas pelaksana, dan tindak lanjut perbaikan yang bertujuan menjamin pertanggungjawaban hasil. Informasi utama yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan Evaluasi (Aspek Administratif): adanya pedoman teknis, pelaksanaan di seluruh unit, dan dilakukan secara berjenjang;
- Kualitas Evaluasi (Aspek Kualitas): Evaluasi dilaksanakan oleh SDM yang memadai, dengan pendalaman yang cukup, menggunakan teknologi informasi (aplikasi), dan didukung data riil;



- Pemanfaatan Evaluasi (Aspek Dampak): tindak lanjut hasil evaluasi, perbaikan manajemen kinerja, dan peningkatan akuntabilitas yang terlihat dari perbaikan hasil kinerja nyata.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai 100 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Predikat Penilaian AKIP

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
A	> 80 – 90	Memuaskan
BB	> 70 – 80	Sangat Baik
B	> 60 – 70	Baik
CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai)
C	> 30 – 50	Kurang
D	> 0 – 30	Sangat Kurang

b. Evaluasi Kinerja

Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja pada unit kerja, dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas pada unit kerja. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Pada tahun 2025 dan 2026, BP3MI Jawa Barat belum dilakukan evaluasi AKIP oleh APIP sehingga masih menggunakan hasil evaluasi tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja KP2MI/BP2MI (internal) yang terakhir tahun 2024, BP3MI Jawa Barat memperoleh nilai **78,30** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.10
Nilai Komponen Manajemen Kinerja

No	Komponen	Bobot	Capaian (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	80,00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	80,00	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	77,00	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	75,00	18,75
Total		100		78,30

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

- Belum terdapatnya dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yang berupa TOR/KAK sehingga perencanaan kinerja belum mendapatkan hasil yang maksimal;
- Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, namun SK/JUKNIS/Pedoman belum ada;
- Sampai dengan saat ini, informasi dalam laporan kinerja belum digunakan sebagai acuan dalam penyesuaian aktivitas, anggaran, keberhasilan kinerja, perencanaan kinerja selanjutnya maupun budaya kinerja organisasi. Penyesuaian anggaran masih berdasarkan kebijakan dari Pimpinan dan Kementerian Keuangan;

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

- Pada penilaian evaluasi kinerja selanjutnya akan dibuat dokumen perencanaan yang mendukung kinerja berupa TOR/KAK;
- Berkoodinasi dengan KP2MI/BP2MI terkait permintaan SK/JUKNIS/Pedoman yang mendukung evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- Menunggu kebijakan pusat terkait acuan dalam penyesuaian aktivitas, anggaran, keberhasilan kinerja, perencanaan kinerja selanjutnya maupun budaya kinerja organisasi.



IKU 6 – Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Utama 6

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3mi	65	66	101,54%

a. Informasi Kinerja

- 1) Hasil penyelenggaraan kearsipan berdasarkan nilai pengawasan kearsipan oleh unit kearsipan BP2MI terhadap BP3MI;
- 2) Pengawasan kearsipan bertujuan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan;
- 3) Penilaian pengawasan kearsipan terdiri dari 2 aspek yaitu pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan;
- 4) Kategori penilaian yang ditetapkan oleh ANRI :
 - 0 - 30 : D (Sangat Kurang)
 - >30 - 50 : C (Kurang)
 - >50 - 60 : CC (Cukup)
 - >60 - 70 : B (Baik)
 - >70 - 80 : BB (Sangat Baik)
 - >80 - 90 : A (Memuaskan)
 - >90 - 100 : AA (Sangat Memuaskan)

b. Evaluasi Kinerja

Pada Triwulan I tahun 2026, masih dalam tahap penilaian Pengawasan Kearsipan Internal. Sehingga untuk tahun 2026 masih menggunakan hasil Pengawasan Kearsipan Internal 2025. Untuk BP3MI Jawa Barat memperoleh nilai 66 berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Internal BP3MI Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan arsip di BP3MI Jawa Barat sudah melebihi target yang telah ditentukan yaitu dengan Nilai 65. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2024 dengan nilai 91,5.

Adapun penurunan nilai pengawasan internal ini didukung dengan beberapa faktor sebagai berikut:

- Terjadinya mutasi dan rotasi arsiparis ke unit layanan di daerah sebagai penyesuaian kebutuhan pegawai untuk mendukung pelaksanaan penugasan



lain, sehingga berdampak pada keterbatasan pengelolaan kearsipan di unit kerja.

- Keterbatasan jumlah arsiparis atau petugas pengelola kearsipan dibandingkan dengan volume arsip yang harus dikelola.
- Sumber daya kearsipan di BP3MI Jawa Barat telah rutin mengikuti bimbingan teknis kearsipan, namun belum mengikuti sertifikasi kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI, sementara sertifikasi tersebut merupakan salah satu unsur penilaian pengawasan kearsipan.
- Keterbatasan jumlah arsiparis dibandingkan dengan jumlah arsip tercipta yang harus diperiksa sebelum penandatanganan, sehingga masih terdapat naskah dinas keluar yang belum sepenuhnya memenuhi standar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan pemanfaatan aplikasi sistem tata naskah dinas elektronik dalam proses penciptaan arsip.
- Arsiparis/pengelola arsip yang tersedia belum dapat melaksanakan pengelolaan kearsipan secara optimal karena masih dibebani dengan beberapa penugasan lain di luar tugas dan fungsi kearsipan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan beban kerja di BP3MI Jawa Barat.

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

- Terjadinya mutasi dan rotasi arsiparis ke unit layanan di daerah sebagai penyesuaian kebutuhan pegawai untuk mendukung pelaksanaan penugasan lain, sehingga berdampak pada keterbatasan pengelolaan kearsipan di unit kerja.
- Keterbatasan jumlah arsiparis atau petugas pengelola kearsipan dibandingkan dengan volume arsip yang harus dikelola.
- Sumber daya kearsipan di BP3MI Jawa Barat telah rutin mengikuti bimbingan teknis kearsipan, namun belum mengikuti sertifikasi kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI, sementara sertifikasi tersebut merupakan salah satu unsur penilaian pengawasan kearsipan.
- Keterbatasan jumlah arsiparis dibandingkan dengan jumlah arsip tercipta yang harus diperiksa sebelum penandatanganan, sehingga masih terdapat naskah dinas keluar yang belum sepenuhnya memenuhi



standar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan pemanfaatan aplikasi sistem tata naskah dinas elektronik dalam proses penciptaan arsip.

- Arsiparis/pengelola arsip yang tersedia belum dapat melaksanakan pengelolaan kearsipan secara optimal karena masih dibebani dengan beberapa penugasan lain di luar tugas dan fungsi kearsipan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan beban kerja di BP3MI Jawa Barat.

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

- BP3MI Jawa Barat telah mengusulkan penambahan arsiparis/pengelola arsip melalui mekanisme penempatan, mutasi internal, atau usulan formasi sesuai kebutuhan beban kerja kearsipan ke Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- Arsiparis yang sebelumnya diberikan penugasan di luar tugas dan fungsi kearsipan akan dikembalikan sesuai dengan jabatan dan fungsinya, sehingga dapat lebih fokus dalam melaksanakan pengelolaan kearsipan.
- Menetapkan petugas pengelola arsip di setiap unit kerja dan tim kerja untuk membantu arsiparis dalam pengelolaan arsip aktif.
- Menyempurnakan dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi sistem tata naskah dinas elektronik dalam proses penciptaan arsip, serta mulai mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang dikembangkan oleh ANRI.
- BP3MI Jawa Barat telah mengusulkan keikutsertaan arsiparis/pengelola arsip dalam pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pengisian formulir *Training Needs Analysis* (TNA).

IKU 7 – Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Utama 7

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI	80	47,53	59,41%



a. Informasi Kinerja

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja sebagai pertanggungjawaban secara profesional kepada stakeholder atas penggunaan anggaran. EKA dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Nilai kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran tingkat satuan kerja pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Perhitungan nilai capaian kinerja anggaran merupakan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-KL yang terdapat pada SMART Kementerian Keuangan. Adapun nilai kinerja anggaran tingkat satuan kerja merupakan nilai kinerja atas aspek implementasi yang dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat satuan kerja yang meliputi:

- Penyerapan anggaran
- Konsistensi anggaran terhadap perencanaan
- Capaian rincian output
- Nilai efisiensi satuan kerja

b. Evaluasi Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja anggaran menggunakan aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Kinerja Terpadu) Kemenkeu yang merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam memonitoring dan mengevaluasi kinerja anggaran. Berdasarkan aplikasi SMART, realisasi nilai capaian kinerja anggaran BP3MI Jawa Barat Triwulan I tahun 2026 bernilai 47,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.13
Nilai Kinerja Anggaran

NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
3,65	91,41	47,53

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat



Pada awal tahun, biasanya aplikasi masih belum digunakan secara optimal, karena masih dalam tahap pengembangan. Sehingga untuk Nilai Kinerja Anggaran yang tercantum pada aplikasi masih 0, sedangkan untuk realisasi anggaran pada aplikasi keuangan lainnya sudah muncul angka realisasinya.

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

- Melakukan penajaman terhadap target prioritas nasional. Penajaman dilakukan dengan menghitung dengan cermat anggaran yang dibutuhkan untuk layanan penempatan, perlindungan dan pemberdayaan berdasarkan *baseline* data yang dimiliki;
- Koordinasi dengan Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Umum serta APIP terkait pelaksanaan anggaran serta monitoring dan evaluasi penggunaannya, sehingga jika ditemukan kendala dapat segera diatasi.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan guna pencapaian sasaran tahun 2026, BP3MI Jawa Barat didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.057.485.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari Program Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Program Dukungan Manajemen. Sampai dengan akhir triwulan I telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 1.418.515.754,- (28,05%). Untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran, maka dilakukan perbandingan antara penyerapan anggaran dengan pencapaian kinerja pada setiap sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14
Capaian Anggaran dan Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Anggaran (Rp)			Kinerja			
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi Triwulan I	%	Rata-rata Capaian Tahun 2026 (%)
1	Tersedianya Data Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	606.720.000	0	0	2.100 orang	0	0	0



No	Sasaran Strategis	IKU	Anggaran (Rp)			Kinerja			
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi Triwulan I	%	Rata-rata Capaian Tahun 2026 (%)
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Nonpemerintah	Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan	1.123.059.000	125.141.900	11,14	63%	74,8%	118,73	118,73
3	Meningkatnya Fasilitas Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	30.622.000	3.394.413	11,08	100%	100%	100	100
4	Meningkatnya Fasilitas Layanan Pemberdayaan oleh BP3MI	Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi oleh BP3MI	147.271.000	26.391.520	17,92	64 orang	12 orang	18,75	18,75
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan di Lingkungan BP3MI	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	3.130.414.000	1.260.262.421	40,26	75	78,30	104,4	104,4
		Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI				65	66	101,54	101,54
		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI				80	47,53	59,41	59,41

Melihat capaian pada tabel di atas, perlu dilakukan upaya-upaya untuk terwujudnya efisiensi pencapaian Sasaran Strategis secara optimal. Hal ini dapat dicapai melalui komitmen pimpinan terhadap pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap target kinerja, program dan kegiatan serta penggunaan anggaran pada unit organisasi masing-masing.



BAB III – PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. PERMASALAHAN

Laporan Kinerja BP3MI Jawa Barat Triwulan I menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis BP3MI Jawa Barat Tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Capaian kinerja BP3MI Jawa Barat Triwulan I dapat dinyatakan cukup “Berhasil”, karena realisasi 4 dari 7 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 100% ke atas, dengan rincian :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 3 target; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Selain itu, secara keseluruhan capaian kinerja BP3MI Jawa Barat Triwulan I mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti memperbanyak kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, koordinasi dengan stake holder terkait mengenai penanganan pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia, sehingga terwujudnya instansi yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Pada Tahun 2020 Covid-19 terjadi di Indonesia sekitar dua tahun sehingga negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia banyak yang ditutup dan pada bulan Agustus tahun 2020 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang penetapan negara tujuan penempatan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Keputusan tersebut sebagai dasar penempatan



negara tujuan pekerja migran Indonesia dalam proses penempatan sehingga GTM terjadi penurunan yang drastis dalam penempatan pekerja migran Indonesia. Tahun 2022 proses pelayanan penyiapan pekerja migran di Jawa Barat mulai meningkat khususnya calon pekerja migran terampil dan professional baik dari skema pemerintah, swasta, maupun mandiri.

Tahun 2023 terdapat peralihan sistem penempatan pekerja migran Indonesia dari SISKOTKLN ke SIAPKerja yang selanjutnya terintegrasi dengan SISKOP2MI. Adanya perubahan sistem tersebut membutuhkan penyesuaian khususnya pada skema penempatan P to P. Selain itu, di beberapa jabatan dalam SIP2MI telah habis masa berlakunya dan kurang tersedianya peminat calon pekerja migran Indonesia terhadap jabatan tersebut.

Permasalahan yang terdapat pada kegiatan Pelindungan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ketidakhadiran pihak P3MI pada saat jadwal klarifikasi & mediasi sehingga menghambat proses penyelesaian aduan;
- 2) Tidak tersedianya informasi progress penanganan yang dilakukan oleh Perwakilan RI di negara penempatan bagi kasus yang sudah dilimpahkan ke pihak eksternal, sebelum diterimanya surat brafax laporan penanganan aduannya;
- 3) Ketidaksediaan dan ketidaksiapan pengadu/keluarga pada proses pendampingan Laporan Polisi terhadap calo perseorangan mulai dari lengkapnya dokumen sebagai barang bukti, pengetahuan atas keseluruhan proses penyiapan penempatan, eksploitasi yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia, ketersediaan saksi lain yang mendukung pernyataan pengadu, dsb;
- 4) Ketidaklengkapan dokumen aduan sehingga minimnya informasi yang dapat dicantumkan dalam surat penanganan aduan, serta pengadu tidak mengetahui pihak-pihak yang memproses penempatan illegal Pekerja Migran Indonesia (calo / pemproses baik yang dikenal langsung maupun lewat media sosial);
- 5) Belum adanya informasi atau aduan yang diterima terkait keberadaan penampungan / proses penempatan nonprosedural Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Jawa Barat;
- 6) Keinginan Calon Pekerja Migran Indonesia hasil pengamanan untuk tetap berangkat secara nonprocedural setelah diamankan, diedukasi dan dipulangkan ke daerah asal;



- 7) Pemulangan Pekerja Migran Indonesia terlaksana di luar wilayah Jawa Barat sehingga biaya fasilitasi pemulangan relatif lebih besar dari yang telah dianggarkan;
- 8) Informasi rencana kepulangan kerap baru diterima dihari yang sama dengan jadwal kepulangannya, sehingga tidak terdapat cukup waktu untuk mengkoordinasikan fasilitasi pendampingan dengan pemerintah daerah asal di wilayah Jawa Barat;
- 9) Tidak tersedianya dokumen identitas dan kontak keluarga dari Pekerja Migran Indonesia yang akan dituju setelah tiba di Indonesia; serta
- 10) Pada triwulan I tahun 2025, belum dapat terselenggara kegiatan pemberdayaan karena kebijakan efesiensi.

B. SARAN TINDAK LANJUT

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

BP3MI Jawa barat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi peluang kerja ke luar negeri dan migrasi aman di wilayah Jawa Barat dengan tujuan pemahaman masyarakat Jawa barat terhadap proses penempatan yang procedural ke negara penempatan serta menghindari adanya calo-calo penempatan yang menjanjikan proses penempatan yang cepat namun ilegal. Selain itu, di setiap kantor BP2MI di wilayah Jawa Barat yaitu BP3MI Jawa Barat, P4MI, dan LTSA tersedia layanan jobsinfo untuk para pencari kerja yang ingin bekerja ke luar negeri. Tahun 2023 kementerian ketenagakerjaan mengeluarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2023 tentang pencabutan keputusan Menteri ketenagakerjaan nomor 294 Tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sehingga penempatan negara tujuan terbuka lebar untuk calon pekerja migran yang telah memiliki dokumen lengkap untuk bekerja ke luar negeri.



Tindak lanjut untuk permasalahan yang terdapat pada kegiatan Pelindungan adalah sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan ulang kegiatan klarifikasi & mediasi, dukungan pendampingan oleh tim Direktorat Layanan Pengaduan dan Mediasi Advokasi Perseorangan maupun Berbadan Hukum pada saat agenda klarifikasi & mediasi, serta Pelimpahan aduan ke BP2MI pusat;
- 2) Penyampaian surat permohonan perkembangan tindak lanjut penanganan aduan Pekerja Migran Indonesia kepada direktorat pengaduan Kementerian P2MI agar dapat dikoordinasikan kepada Perwakilan RI di negara penempatan;
- 3) Pendalaman kesiapan dan ketersediaan bahan pendampingan Laporan Polisi, tim juga telah menyusun daftar informasi dan bukti yang perlu disiapkan serta dibahas sebelum pelaksanaan LP;
- 4) Penyampaian prosedur penerimaan aduan serta aduan yang dinyatakan valid dan dapat ditindaklanjuti, pengecekan data penempatan pada SISKOP2MI, serta pemberian waktu tambahan bagi pengadu untuk melengkapi dokumen aduan;
- 5) Berkoodinasi dengan satker LTSA dan P4MI BP3MI Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Kab Kota di Jawa Barat, Polda Jawa Barat & Polres di wilayah Jawa Barat, terkait dugaan penempatan ilegal CPMI;
- 6) Edukasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia hasil pengamanan, serta pendampingan Laporan Polisi untuk melaporkan calo perorangan yang memproses keberangkatan agar bisa dilakukan pengamanan dokumen perjalanan dan tidak disalahgunakan untuk kembali diproses secara ilegal;
- 7) Berkoordinasi dengan BP3MI titik debarkasi (BP3MI Banten & Bali) / transit (BP3MI Jakarta) untuk dapat memfasilitasi penanganan ketibaan dan pemulangan ke daerah asal, serta koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan penerimaan keluarga di daerah asalnya;
- 8) Berkolaborasi antara BP3MI Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal fasilitasi penanganan penjemputan dan pendampingan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sakit, terkendala, dan meninggal sampai ke daerah asal;



- 9) Penelusuran kepada stakeholder terkait di pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa, bahkan melibatkan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta kantor urusan agama;
- 10) Percepatan proses pendataan dan identifikasi calon peserta program pemberdayaan sebagai langkah awal persiapan kegiatan sementara menunggu ketersediaan anggarannya.